

## **Pengaruh Struktur Pengelolaan Korporasi Terhadap Transparansi: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia**

*Dody Hapsoro*<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

The objective of this study is to investigate the effect of the corporate governance mechanisms, especially the firm's control structure on the transparency of company. The firm's control structure consists of four variables, which are the proportion of the number of board of directors from the number of board of commissioners and the number of audit committees, the proportion of the number of board of directors from the number of board of commissioners, the number of board of directors and the number of audit committees, the proportion of the number of independent board of commissioners and the number of audit committees from the number of board of commissioners and the number of audit committees, and the proportion of the number of independent board of commissioners and the number of audit committees from the number of board of commissioners, the number of board of directors and the number of audit committees. The transparency of company consists of two variables, which are the level of non-compliance mandatory disclosures and the level of voluntary disclosures.

In this study, have been developed 8 hypotheses. All hypotheses are developed based on the relationship between of two constructs, which are the corporate governance mechanisms and the transparency

of company. This study uses the sample of 285 firms listed at the Jakarta Stock Exchange and the Surabaya Stock Exchange in 2003. The hypotheses are tested by using ordinary least squares regressions.

The results of this study are as follows: (1) the effect of the proportion of the number of board of directors from the number of board of commissioners and the number of audit committees on non-compliance mandatory disclosures is statistically significant, (2) the effect of the proportion of the number of board of directors from the number of board of commissioners and the number of audit committees on voluntary disclosures is statistically significant, (3) the effect of the proportion of the number of board of directors from the number of board of commissioners, the number of board of directors and the number of audit committees on non-compliance mandatory disclosures is statistically significant, (4) the effect of the proportion of the number of board of directors from the number of board of commissioners, the number of board of directors and the number of audit committees on voluntary disclosures is statistically significant, (5) the effect of the proportion of the number of independent board of commissioners and the number of audit committees from the number of board of commissioners and the number of audit committees on non-compliance mandatory disclosures is statistically significant, (6) the effect of the

---

<sup>1</sup> Dr. Dody Hapsoro, MSPA., MBA., Akuntan adalah Dosen Tetap Jurusan Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta.

proportion of the number of independent board of commissioners and the number of audit committees from the number of board of commissioners and the number of audit committees on voluntary disclosures is statistically significant, (7) the effect of the proportion of the number of independent board of commissioners and the number of audit committees from the number of board of commissioners, the number of board of directors and the number of audit committees on non-compliance mandatory disclosures is statistically significant, (8) the effect of the proportion of the number of independent board of commissioners and the number of audit committees from the number of board of commissioners, the number of board of directors and the number of audit committees on voluntary disclosures is statistically significant

**Keywords:** corporate governance mechanisms (control structure) and transparency (the level of non-compliance mandatory disclosures and the level of voluntary disclosures).

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1990-an, studi tentang *disclosure* (pengungkapan), baik pengungkapan sukarela maupun pengungkapan wajib telah banyak dilakukan di Indonesia. Sebagian besar studi tersebut berkaitan dengan pengujian tentang hubungan dan atau pengaruh berbagai karakteristik perusahaan terhadap perilaku pengungkapan perusahaan publik. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan pengungkapan sukarela antara lain adalah Susanto (1992), Suropto (1998), Na'im dan Rakhman (2000), Marwata (2001), dan Gunawan (2002). Sedangkan penelitian yang berhubungan dengan pengungkapan wajib antara lain adalah Subiyantoro (1997), Fitriany (2001), dan Subroto (2003).

Beberapa peneliti berpendapat bahwa terdapat variabel penjelas lain yang perlu diidentifikasi untuk tujuan pengujian tentang perilaku pengungkapan (Ho and Wong, 2000). Para peneliti mengakui bahwa mekanisme *corporate governance* juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap praktik *disclosure* korporat. Struktur *corporate governance* secara

spesifik telah banyak direkomendasi oleh berbagai lembaga otoritas dalam rangka memperbaiki transparansi, mencegah perusahaan dari kemungkinan terjadinya pelaporan keuangan yang tidak jujur dan melindungi kepentingan pemegang saham.

Berbagai hasil studi mengenai hubungan antara *corporate governance* dengan *disclosure* korporat telah banyak dipublikasi. Atribut *corporate governance* yang diuji antara lain adalah variabel struktur kepemilikan (Ruland, Tung and George, 1990; Mckinnon and Dalimunthe, 1993; Malone, Fries, and Jones, 1993; Brennan, 1995; Raffournier, 1995), proporsi atau keberadaan komisaris independen (Forker, 1992; Malone, Fries, and Jones, 1993; Chen and Jaggi, 1998), penunjukan komisaris independen sebagai ketua dewan komisaris (Forker, 1992), dan keberadaan komite audit (Forker, 1992; Chen and Jaggi, 1998; Ho and Wong, 2000). Namun, hasil-hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pengaruh sebagian besar atribut *corporate governance* terhadap *disclosure* adalah tidak konklusif (*mixed*).

### Permasalahan Penelitian

Menurut Lins and Warnock (2004), secara umum mekanisme yang dapat mengendalikan perilaku manajemen atau sering disebut mekanisme *corporate governance* dapat diklasifikasi kedalam dua kelompok. Pertama adalah mekanisme internal spesifik perusahaan, yang terdiri atas struktur kepemilikan perusahaan dan struktur pengelolaan atau pengendalian perusahaan. Kedua adalah mekanisme eksternal spesifik negara, yang terdiri atas aturan hukum dan pasar pengendalian korporat.

Keberadaan mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat mengendalikan perilaku manajemen agar di dalam mengelola kegiatan korporasi dapat dilakukan secara terbuka, sehingga pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengkaji berbagai keputusan dan dasar pengambilan keputusan yang diambil manajemen, serta menilai keefektifan keputusan yang diambil oleh manajemen. Oleh karena itu, baik tidaknya *corporate governance* seharusnya dapat dilihat dari dimensi keterbukaan (transparansi). Sebagaimana dikemukakan oleh Cadbury (1996) bahwa prinsip dasar di dalam pengelolaan suatu korporasi adalah terjadinya *disclosure*.

*Disclosure* memberikan implikasi bahwa keterbukaan merupakan basis kepercayaan publik terhadap manajemen di dalam sistem korporasi. Dengan kata lain, kualitas mekanisme *corporate governance* seharusnya dapat dilihat dari tingkat keterbukaan atau transparansi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* yang buruk berkorelasi dengan transparansi yang rendah, yang secara negatif akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena *corporate governance* yang buruk dan rendahnya transparansi dapat meningkatkan risiko estimasi bagi investor luar (Lins and Warnock, 2004).

Penelitian yang menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* (khususnya mekanisme spesifik internal perusahaan yang berkaitan dengan variabel struktur kepemilikan perusahaan) terhadap transparansi telah dilakukan di Indonesia. Sebagai contoh, Na'im dan Rakhman (2000) serta Khomsiyah (2005). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kepemilikan publik dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan informasi. Di dalam penelitian ini secara spesifik akan diuji pengaruh mekanisme *corporate governance* (khususnya mekanisme spesifik internal perusahaan yang berkaitan dengan variabel struktur pengelolaan atau pengendalian perusahaan) terhadap transparansi. Oleh karena itu, permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah apakah struktur pengelolaan atau pengendalian perusahaan korporasi berpengaruh terhadap transparansi?

### **Motivasi Penelitian**

Keberadaan *corporate governance* terutama dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku eksekutif puncak perusahaan dalam rangka melindungi kepentingan pemilik perusahaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Denis and McConnell (2003) bahwa *corporate governance* merupakan sekumpulan mekanisme—baik berbasis institusi maupun pasar—yang mengarahkan pengelola perusahaan untuk membuat keputusan yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan sehingga memberi manfaat bagi pemilik. Hal tersebut didasari alasan karena pada pengelolaan perusahaan korporasi, pemilik perusahaan tidak lagi berada dalam posisi yang dapat mengendalikan jalannya

kegiatan perusahaan secara langsung, sehingga pengelolaan perusahaan harus diserahkan kepada manajer profesional. Oleh karena itu, kewenangan untuk menggunakan sumber daya perusahaan sepenuhnya berada di tangan para eksekutif perusahaan. Pemilik perusahaan mengharapkan agar manajemen bertindak profesional di dalam mengelola perusahaan dan setiap keputusan yang diambil manajemen didasarkan pada kepentingan pemegang saham, serta sumber daya yang ada semata-mata digunakan untuk kepentingan pertumbuhan nilai perusahaan.

Sejalan dengan pengertian di atas, pengendalian terhadap jalannya kegiatan perusahaan seharusnya lebih diarahkan terhadap pengawasan perilaku manajer agar yang dilakukan manajer dapat dinilai manfaatnya bagi perusahaan (pemilik) dan/atau bagi kepentingan manajer sendiri. Dengan kata lain, pengendalian seharusnya tidak diarahkan pada upaya pengekanan kreativitas dan potensi manajemen, tetapi lebih pada upaya untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara terbuka, sehingga pemilik perusahaan dapat melaksanakan proses monitoring secara efektif terhadap manajemen. Sedangkan yang harus dikendalikan atau yang menjadi target pengendalian adalah *discretion* dan *decision* manajemen. Apabila proses monitoring berjalan efektif, diharapkan akan tercipta suatu *good corporate governance*, karena banyak pihak yang berkepentingan terhadap terciptanya *good corporate governance*. Bagi pemegang saham (investor), *good corporate governance* memberikan jaminan bahwa mereka akan memperoleh *returns* yang memadai atas dana yang ditanamkan ke perusahaan. Sedangkan bagi badan-badan otoritas, *good corporate governance* akan meningkatkan efisiensi, integritas, dan kredibilitas pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi yang pada gilirannya akan menentukan alokasi dana masyarakat kepada kegiatan ekonomi yang produktif (Shleifer and Vishny, 1997).

Oleh karena itu, penelitian ini didasari motivasi bahwa *corporate governance* (khususnya struktur pengelolaan atau pengendalian perusahaan) seharusnya dapat mendorong transparansi, karena keberadaan *corporate governance* terutama dimaksudkan agar pengelolaan atau pengendalian kegiatan perusahaan dapat dilakukan secara terbuka (*transparent*).

### Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap transparansi. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.
2. Menguji pengaruh proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
3. Menguji pengaruh proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.
4. Menguji pengaruh proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
5. Menguji pengaruh proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.
6. Menguji pengaruh proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
7. Menguji pengaruh proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.
8. Menguji pengaruh proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

### TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### Telaah Literatur

Cadbury Committee (1996) mendefinisi *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Pada umumnya *corporate governance* dipandang sebagai cara yang efektif untuk menggambarkan tentang hak dan tanggung jawab masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Manajer merupakan agen dan pemilik merupakan prinsipal. Pemilik ingin memperoleh jaminan untuk mendapatkan *return* atas investasinya, meskipun mereka tidak secara langsung terlibat di dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan kegiatan internal perusahaan. Di lain pihak, manajer yang tidak menyukai risiko (*risk averse*) akan bertindak secara oportunistik dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham (Jensen and Meckling, 1976; Fama and Jensen, 1983). Oleh karena itu, agar perusahaan dikelola dengan efisien, maka tindakan atau perilaku manajer harus dapat dimonitor.

#### Struktur Pengelolaan/Pengendalian

Menurut Short et al. (1999), *corporate governance* menyangkut sarana, mekanisme, dan struktur yang berperan sebagai pengecekan atas *self-serving behavior* manajer. Secara teoritis, manajer yang menerima kewenangan dari pemilik perusahaan untuk mengelola kegiatan perusahaan sehari-hari seharusnya memiliki komitmen, loyalitas, dan motivasi yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan perusahaan yang dikelolanya. Namun, dalam kenyataan sering terjadi keputusan yang diambil manajemen tidak ditujukan untuk kepentingan perusahaan, tetapi justru untuk kepentingan para eksekutif dan sebagai akibatnya merugikan kepentingan perusahaan dan pemilik perusahaan. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya *self-serving behavior* oleh manajer, pengelolaan perusahaan seharusnya dapat dilakukan secara terbuka, sehingga memberi peluang bagi pemilik dan berbagai pihak yang berkepentingan lainnya untuk melakukan monitoring terhadap perilaku manajer di dalam mengelola perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Keasy and Wright

(1997) bahwa *corporate governance's key elements concern the enhancement of corporate performance via the supervision or monitoring of management performance and ensuring the accountability of management to shareholders and other stakeholders*.

Selanjutnya menurut Salowe (2002), terdapat sejumlah faktor yang dapat mendorong terciptanya pengelolaan perusahaan yang efektif, yaitu *internal auditors, board of directors, senior management, dan external auditors*. Di antara berbagai faktor tersebut, dewan komisaris merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku manajer di dalam pengelolaan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Mizruchi (1983) bahwa dewan komisaris merupakan "*the ultimate center of control*". Selanjutnya Walsh and Seward (1990); Jensen (1993); Pound (1995); serta Phan (2000) juga menekankan bahwa peranan utama dewan komisaris adalah dalam hal menjalankan fungsi pengendalian. Apabila dewan komisaris dapat menjalankan fungsi dan peranannya dengan sangat baik, diharapkan akan memberikan jaminan bahwa perusahaan dikelola sesuai kepentingan terbaik pemilik perusahaan (Bai et al., 2003).

Secara umum proposisi dasarnya adalah bahwa struktur pengelolaan atau pengendalian perusahaan akan mempengaruhi kualitas pengelolaan perusahaan, artinya semakin baik struktur pengelolaan atau pengendalian, semakin tinggi kualitas pengelolaan. Oleh karena itu, agenda yang akan diuji di dalam penelitian ini adalah apakah variasi struktur pengelolaan atau pengendalian akan mempengaruhi kualitas pengelolaan. Variasi tersebut dapat berupa perbedaan kualitas anggota dewan komisaris, komposisi keanggotaan dewan komisaris, keberadaan dan jumlah anggota komisaris independen, serta jumlah anggota (*size*) untuk setiap elemen struktur di antara berbagai perusahaan yang *go public (across firms)*. Dengan kata lain, apakah berbagai komponen struktur pengelolaan atau pengendalian yang terdapat di dalam setiap perusahaan akan mempengaruhi tingkat transparansi perusahaan.

### Transparansi

Laporan tahunan merupakan media utama penyampaian informasi oleh manajemen kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan tahunan terdiri atas bagian

laporan manajemen, bagian ikhtisar data keuangan, bagian analisis dan pembahasan umum oleh manajemen, serta bagian laporan keuangan. Laporan tahunan mengkomunikasikan informasi kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditor dan *stakeholders* (atau calon *stakeholders*) lainnya. Laporan tersebut juga menjadi alat utama bagi para manajer untuk menunjukkan keefektifan pencapaian tugas dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam organisasi.

Informasi yang diungkap dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan kedalam pengungkapan wajib dan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Pengungkapan wajib di Indonesia diatur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000. Pada tanggal 27 Desember 2002, peraturan tersebut disempurnakan melalui Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor 02/PM/2002. Di dalam surat edaran tersebut telah diatur tentang pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik untuk 13 (tiga belas) industri. Selain itu, pengungkapan wajib di Indonesia juga diatur berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2 Tahun 1996.

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi melebihi yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pembuatan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan (Meek, Robert, and Gray, 1995).

Pada penelitian ini, tingkat transparansi diprosikan dengan dua tingkat pengungkapan informasi, yaitu tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib dan tingkat pengungkapan sukarela

### Perumusan Hipotesis

Pada perusahaan yang sahamnya dimiliki secara luas oleh masyarakat, biasanya akan terjadi pemisahan secara tegas antara pemilik dan pengelola perusahaan. Pengelola perusahaan (direksi) bertanggung jawab langsung terhadap jalannya kegiatan operasional perusahaan. Direksi menjalankan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan atas kewenangan yang diterima dari pemilik perusahaan (*agency relationship*).

Di dalam menjalankan kewenangannya, direksi tidak selalu bertindak sesuai kepentingan terbaik pemilik perusahaan. Direksi dapat melakukan hal tersebut karena sebagai pihak yang secara langsung menjalankan kegiatan perusahaan, mereka memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan pemilik perusahaan (*asymmetry information*).

Dengan keterbatasan informasi yang dimiliki, pemilik perusahaan biasanya akan menunjuk dewan komisaris untuk memonitor jalannya kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, dewan komisaris menjalankan fungsinya untuk mengawasi direksi yang menjalankan kegiatan perusahaan untuk dan atas nama kepentingan pemilik perusahaan. Pada penelitian ini, termasuk di dalam susunan anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Keberadaan komisaris independen di Indonesia telah diatur oleh Bursa Efek Jakarta melalui Peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa perusahaan yang tercatat di bursa harus mempunyai komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas. Dalam peraturan ini, juga ditetapkan bahwa persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Teori keagenan positif menurut Jensen and Meckling (1976) memberikan rerangka kerja yang menghubungkan antara perilaku *corporate governance* dengan *disclosure*. Teori keagenan memprediksi bahwa keberadaan alat pengendalian internal, seperti komite audit, komisaris independen dan pemisahan peran CEO (direksi) dari presiden komisaris akan mengurangi biaya keagenan, meningkatkan kualitas pengendalian dan mengurangi manfaat penahanan informasi, sehingga meningkatkan kelengkapan *disclosure* dan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa argumen teoritis di atas, maka selanjutnya pada penelitian ini dapat dirumuskan beberapa hipotesis alternatif sebagai berikut:

- H1: Proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.
- H2: Proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah

anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

- H3: Proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.
- H4: Proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
- H5: Proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.
- H6: Proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
- H7: Proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.
- H8: Proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela

## METODOLOGI

### Sampel dan Data

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan terdaftar secara aktif di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) pada periode pelaporan tahun 2003.
2. Tiga belas industri menggunakan item *checklist disclosure* sesuai S.E. Ketua Bapepam Nomor 02/PM/2002, sedangkan industri perbankan, asuransi, jasa keuangan, dan industri investasi menggunakan

- item *checklist disclosure* sesuai Peraturan Bapepam No. VIII.G7.
3. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan untuk tahun 2003 dan memiliki laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2003.
  4. Perusahaan tidak memiliki *leverage ratio* negatif.

*Leverage ratio* negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang bermasalah di dalam memenuhi kewajiban keuangan.

Berdasarkan kriteria sampel, diperoleh 285 perusahaan. Perolehan sampel dilakukan secara bertahap sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Proses Pemilihan Sampel**

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di pasar modal pada tahun 2003	329
Perusahaan yang teridentifikasi tidak memiliki atau menerbitkan laporan tahunan dan laporan auditor independen	(11)
Perusahaan yang teridentifikasi memiliki atau menerbitkan laporan tahunan dan laporan auditor independen	318
Perusahaan yang memiliki <i>leverage ratio</i> negatif	(25)
Perusahaan yang memiliki nilai <i>beta</i> terapan, volume perdagangan saham atau volatilitas harga saham sama dengan nol	(8)
Perusahaan yang dipilih sebagai sampel	285

**Variabel-variabel yang Diteliti**

Penelitian dilakukan dalam 8 tahap regresi. Pada setiap tahap regresi, yang ditetapkan sebagai variabel kontrol adalah jenis industri, ukuran (*size*) perusahaan, rasio *leverage*, status kantor akuntan publik, periode waktu *listing* dan status *listing*.

Pada tahap pertama, variabel proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit diuji pengaruhnya terhadap variabel tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib. Pada tahap kedua, variabel proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit diuji pengaruhnya terhadap variabel tingkat pengungkapan sukarela. Pada tahap ketiga, variabel proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit diuji pengaruhnya terhadap variabel tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib. Pada tahap keempat, variabel proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan

direksi dan jumlah anggota komite audit diuji pengaruhnya terhadap variabel tingkat pengungkapan sukarela. Pada tahap kelima, variabel proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit diuji pengaruhnya terhadap variabel tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib. Pada tahap keenam, variabel proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit diuji pengaruhnya terhadap variabel tingkat pengungkapan sukarela. Pada tahap ketujuh, variabel proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit diuji pengaruhnya terhadap variabel tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib. Pada tahap kedelapan, variabel proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari dewan komisaris, direksi dan jumlah anggota komite audit diuji pengaruhnya terhadap variabel tingkat pengungkapan sukarela.

**Pengukuran Variabel Independen**

**a. Pengukuran variabel proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit**

Proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit dihitung dengan cara membagi jumlah anggota dewan direksi dengan jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit dikurangi satu.

**b. Pengukuran variabel proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit**

Proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit dihitung dengan cara membagi jumlah anggota dewan direksi dengan jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit dikurangi satu.

**c. Pengukuran variabel proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit**

Proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit dihitung dengan cara membagi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dikurangi satu dengan jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit dikurangi satu.

**d. Pengukuran variabel proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit**

Proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit dihitung dengan cara membagi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dikurangi satu dengan jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit dikurangi satu.

**Pengukuran Variabel Dependen**

**a. Pengukuran variabel tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib**

Tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib merupakan selisih antara tingkat pengungkapan wajib maksimum yang seharusnya dipenuhi oleh perusahaan (100%) dengan tingkat pengungkapan wajib yang dapat dipenuhi oleh perusahaan. Tingkat pengungkapan wajib dihitung berdasarkan tingkat ketaatan perusahaan terhadap ketentuan pengungkapan wajib (Baridwan, Machfoedz, dan Tearney, 2001). Perhitungan tingkat pengungkapan wajib adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat pengungkapan wajib} = \frac{Ya}{Ya + Tidak}$$

Keterangan:

Ya = Pengungkapan informasi secara tepat telah dibuat

Tidak = Pengungkapan informasi secara tepat tidak dibuat

Oleh karena itu, pengukuran tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib (TPW) dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$TPW = 100\% - \text{Tingkat pengungkapan informasi wajib}$$



**b. Pengukuran variabel tingkat pengungkapan sukarela**

Pengukuran tingkat pengungkapan sukarela dilakukan melalui dua tahap, yaitu (1) Mengembangkan daftar item pengungkapan sukarela dan (2) Mengukur tingkat atau luas pengungkapan sukarela terhadap sampel laporan tahunan. Daftar item pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan dikembangkan berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya (Cerf, 1961; Singhvi and Desai, 1971; Buzby, 1974; Benjamin and Stanga, 1977; McNally, Eng, and Hasseldine, 1982; Chow and Wong-Boren, 1987; Susanto, 1992; Choi and Mueller, 1992; Meek, Robert, and Gray, 1995; Botosan, 1997; Suripto, 1997; Gunawan, 2002).

Item-item pengungkapan sukarela yang dimasukkan dalam daftar meliputi: (1) Item-item pengungkapan informasi yang diwajibkan di negara-negara maju dan negara-negara berkembang lain yang tidak diwajibkan menurut peraturan Bapepam dan (2) Item-item pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan yang telah dikembangkan dalam penelitian sebelumnya yang tidak diwajibkan menurut peraturan Bapepam mengenai laporan tahunan. Dengan prosedur tersebut diperoleh 35 item informasi yang dapat diungkapkan secara sukarela oleh manajemen dalam laporan tahunan.

**Model Penelitian**

Pada model penelitian, dapat dirumuskan beberapa persamaan sebagai berikut:

$$TPW = a + b_1PDK + b_2JIN + b_3AKT + b_4RLE + b_5SKA + b_6PWL + b_7SLT + \dots \quad (1)$$

$$TPS = a + b_1PDK + b_2JIN + b_3AKT + b_4RLE + b_5SKA + b_6PWL + b_7SLT + \dots \quad (2)$$

$$TPW = a + b_1PDD + b_2JIN + b_3AKT + b_4RLE + b_5SKA + b_6PWL + b_7SLT + \dots \quad (3)$$

$$TPS = a + b_1PDD + b_2JIN + b_3AKT + b_4RLE + b_5SKA + b_6PWL + b_7SLT + \dots \quad (4)$$

$$TPW = a + b_1PKA + b_2JIN + b_3AKT + b_4RLE + b_5SKA + b_6PWL + b_7SLT + \dots \quad (5)$$

$$TPS = a + b_1PKA + b_2JIN + b_3AKT + b_4RLE + b_5SKA + b_6PWL + b_7SLT + \dots \quad (6)$$

$$TPW = a + b_1PKD + b_2JIN + b_3AKT + b_4RLE + b_5SKA + b_6PWL + b_6SLT + \dots \quad (7)$$

$$TPS = a + b_1PKD + b_2JIN + b_3AKT + b_4RLE + b_5SKA + b_6PWL + b_7SLT + \dots \quad (8)$$

**Analisis dan Pembahasan**

a. Pengaruh Proporsi Jumlah Anggota Dewan Direksi dari Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Jumlah Anggota Komite Audit Terhadap Tingkat Ketidaktaatan Pengungkapan Wajib  
 Hasil pengujian asumsi klasik dan hipotesis ditunjukkan pada Tabel 2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tanda koefisien proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit (PDK) adalah positif seperti yang dihipotesiskan

dengan *p-value* sebesar 0,004. Dengan tingkat *alpha* 0,05, maka hipotesis nol berhasil ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.

b. Pengaruh Proporsi Jumlah Anggota Dewan Direksi dari Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela

Hasil pengujian asumsi klasik dan hipotesis ditunjukkan pada Tabel 2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tanda koefisien proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit (PDK) adalah negatif seperti yang dihipotesiskan dengan *p-value* sebesar 0,028. Dengan tingkat *alpha* 0,05, maka hipotesis nol berhasil ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

- c. Pengaruh Proporsi Jumlah Anggota Dewan Direksi dari Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota Dewan Direksi dan Jumlah Anggota Komite Audit Terhadap Tingkat Ketidaktaatan Pengungkapan Wajib

Hasil pengujian asumsi klasik dan hipotesis ditunjukkan pada Tabel 2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tanda koefisien proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit (PDD) adalah positif seperti yang dihipotesiskan dengan *p-value* sebesar 0,078. Dengan tingkat *alpha* 0,10, maka hipotesis nol berhasil ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.

- d. Pengaruh Proporsi Jumlah Anggota Dewan Direksi dari Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota Dewan Direksi dan Jumlah Anggota Komite Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela

Hasil pengujian asumsi klasik dan hipotesis ditunjukkan pada Tabel 2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tanda koefisien proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit (PDD) adalah negatif seperti yang dihipotesiskan dengan *p-value* sebesar

0,052. Dengan tingkat *alpha* 0,10, maka hipotesis nol berhasil ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proporsi jumlah anggota dewan direksi dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

- e. Pengaruh Proporsi Jumlah Komisaris Independen dan Jumlah Anggota Komite Audit dari Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Jumlah Anggota Komite Audit Terhadap Tingkat Ketidaktaatan Pengungkapan Wajib

Hasil pengujian asumsi klasik dan hipotesis ditunjukkan pada Tabel 2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tanda koefisien proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit (PKA) adalah negatif seperti yang dihipotesiskan dengan *p-value* sebesar 0,010. Dengan tingkat *alpha* 0,05, maka hipotesis nol berhasil ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.

- f. Pengaruh Proporsi Jumlah Komisaris Independen dan Jumlah Anggota Komite Audit dari Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Jumlah Anggota Komite Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela

Hasil pengujian asumsi klasik dan hipotesis ditunjukkan pada Tabel 2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tanda koefisien proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit (PKA) adalah positif seperti yang dihipotesiskan dengan *p-value* sebesar 0,001. Dengan tingkat *alpha* 0,05, maka hipotesis nol berhasil ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

- g. Pengaruh Proporsi Jumlah Komisaris Independen dan Jumlah Anggota Komite Audit dari Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota Dewan Direksi dan Jumlah Anggota Komite Audit Terhadap Tingkat Ketidaktaatan Pengungkapan Wajib  
Hasil pengujian asumsi klasik dan hipotesis ditunjukkan pada Tabel 2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tanda koefisien proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit (PKD) adalah negatif seperti yang dihipotesiskan dengan *p-value* sebesar 0,019. Dengan tingkat *alpha* 0,05, maka hipotesis nol berhasil ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib.
- h. Pengaruh Proporsi Jumlah Komisaris Independen dan Jumlah Anggota Komite Audit dari Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota Dewan Direksi dan Jumlah Anggota Komite Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela  
Hasil pengujian asumsi klasik dan hipotesis ditunjukkan pada Tabel 2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tanda koefisien proporsi jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit (PKD) adalah positif seperti yang dihipotesiskan dengan *p-value* sebesar 0,001. Dengan tingkat *alpha* 0,05, maka hipotesis nol berhasil ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proporsi jumlah komisaris komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan direksi dan jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

## SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur pengelolaan perusahaan terhadap transparansi pengelolaan perusahaan. Dari seluruh hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa semua struktur pengelolaan atau pengendalian secara statistis berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi pengelolaan perusahaan. Dengan kata lain, secara keseluruhan keberadaan dan jumlah komisaris independen, dewan komisaris, dan jumlah anggota komite audit mampu mendorong transparansi pengelolaan perusahaan, baik dalam hubungannya dengan ketentuan pengungkapan wajib maupun pengungkapan sukarela.

### Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, meskipun pengukuran terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib telah berpedoman pada Surat Edaran Ketua Bapepam No. 02/PM/2002, namun di dalam pedoman tersebut belum terdapat ketentuan yang secara khusus berlaku untuk industri perbankan, asuransi dan jasa keuangan.

Kedua, di antara tigabelas kelompok industri yang diatur di dalam Surat Edaran Ketua Bapepam No. 02/PM/2002, terdapat salah satu industri yaitu industri investasi yang jumlah item *disclosure*nya terlalu kecil dibandingkan industri yang lain, sehingga dapat menyebabkan pengukuran terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib menjadi tidak proporsional.

### Implikasi

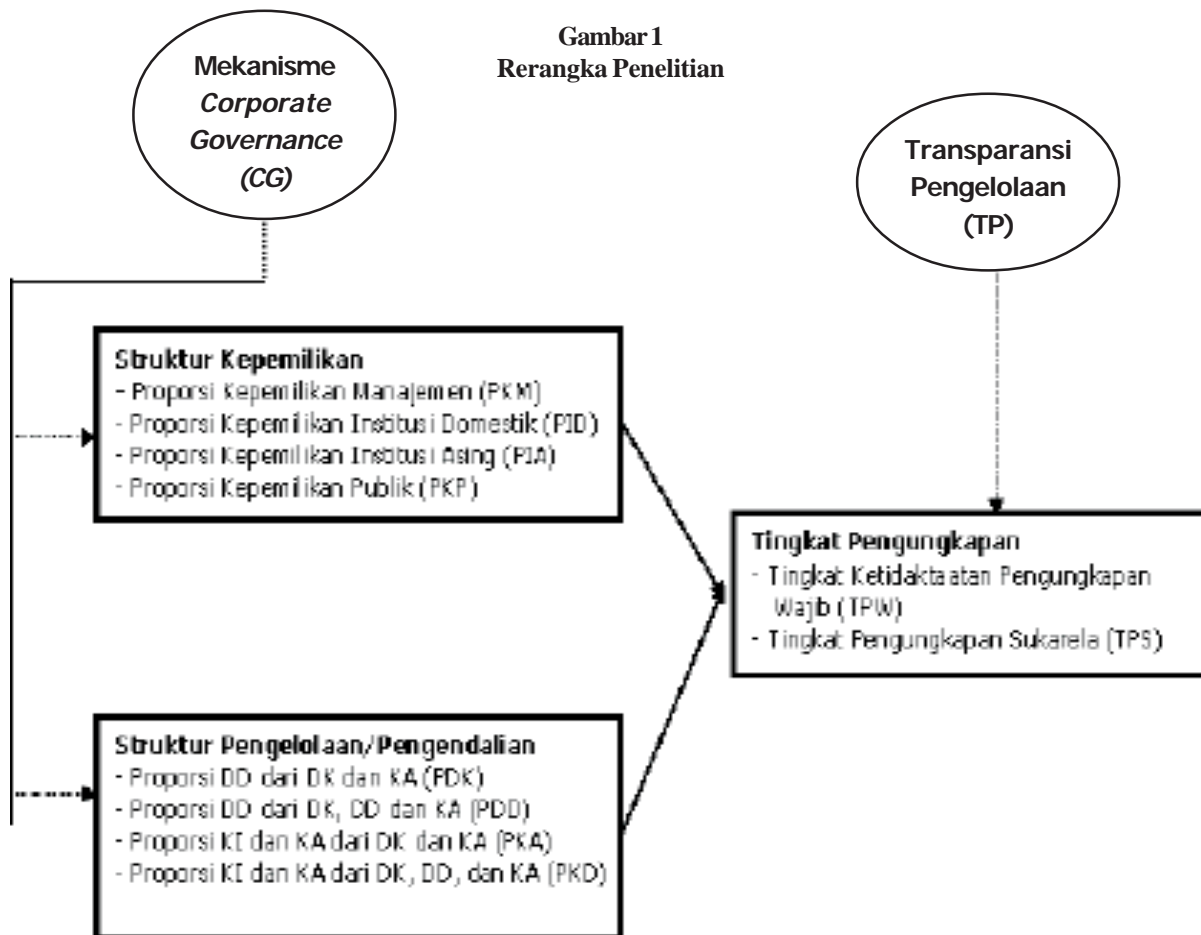
Pada penelitian yang akan datang, pengukuran terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib perlu dikembangkan dengan memperhatikan pedoman yang berlaku untuk setiap industri, termasuk industri perbankan, asuransi, jasa keuangan dan investasi

Implikasi lain berupa implikasi kebijakan, terutama bagi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar bagi Bapepam dan IAI untuk membuat peraturan-peraturan yang semakin mendorong perusahaan-perusahaan publik di Indonesia untuk semakin transparan kepada publik.

Selanjutnya, dari hasil penelitian juga ditunjukkan bahwa rata-rata tingkat ketidaktaatan

pengungkapan wajib adalah 23,09%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan publik yang belum menaati ketentuan pengungkapan wajib. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan sukarela adalah sebesar 38,40%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan publik di Indonesia yang belum mempunyai kesadaran dan kesukarelaan yang tinggi untuk mengungkapkan informasi selain yang diwajibkan oleh peraturan Bapepam.

**Gambar 1**  
**Rerangka Penelitian**



Catatan:

- DD= Jumlah anggota dewan direksi
- DK= Jumlah anggota dewan komisaris
- KA= Jumlah anggota komite audit
- KI= Jumlah komisaris independen

Tabel 2  
Ringkasan Hasil Analisis Regresi

Persamaan	Variabel Dependen	Variabel Independen Utama	Koefisien Variabel Independen Utama	Nilai t	Signifikansi (p-value)	VF	DW	Chejser test	Nilai F Model	R <sup>2</sup>
1	TPM	PDK	1,901	2,878**	0,004***	1,044	1,765	1,140	6,651	0,142
2	TPS	PDK	-2,415	-2,211**	0,028**	1,044	1,879	0,518	5,301	0,113
3	TPM	FDD	7,284	1,787*	0,078*	1,046	1,734	1,177	5,729	0,126
4	TPS	FDD	-13,214	-1,954*	0,052*	1,046	1,871	0,533	4,861	0,109
5	TPM	PKA	-5,928	-2,582**	0,010**	1,062	1,726	1,120	6,302	0,137
6	TPS	PKA	12,722	3,403**	0,001***	1,062	1,867	0,490	6,080	0,133
7	TPM	PKD	-8,543	-2,363**	0,019**	1,066	1,733	1,148	6,128	0,134
8	TPS	PKD	19,004	3,233**	0,001***	1,066	1,864	0,483	5,912	0,130

\*\*\* Signifikan pada tingkat 1%

\*\* Signifikan pada tingkat 5%

\* Signifikan pada tingkat 10%

## DAFTAR PUSTAKA

- Bai, Chong-En, Q. Liu, J. Lu, F. M. Song, and J. Zhang (2003). "Corporate Governance and Market Valuation in China". *William Davidson Working Paper* Number 564.
- Baridwan, Zaki, Mas'ud Machfoedz, and M. G. Tearney (2001). "An Evaluation of Disclosure of Financial Information by Public Companies in Indonesia". *Hasil Penelitian SIAGA-UGM dan Pusat Pengembangan Akuntansi UGM*.
- Benjamin, J. J. and Keith G. Stanga (1977). "Differences in Disclosure Needs of Major Users of Financial Statements". *Accounting and Business Research*, Summer, pp. 187-192.
- Brennan, N. (1995). "Disclosure in Profit Forecast: Evidence from UK Takeover Bids". *Unpublished Conference Paper, 18<sup>th</sup> Annual Congress of the European Accounting Association*, Birmingham, England.
- Brickley, James A., Ronald C. Lease and Clifford W. Smith, Jr. (1988). "Ownership Structure and Voting on Antitakeover Amendments". *Journal of Financial Economics* 20, pp. 267-291.
- Buzby, Stephen L. (1974). "Selected Items of Information and Their Disclosure in Annual Reports". *The Accounting Review*, July, pp. 423-435.
- Cadbury, Sir Adrian (1996). "Corporate Governance: Brussels". *Instituut voor Bestuurders, Brussel*.
- Cerf, Alan R. (1961). "Corporate Reporting and Investment Decisions". Berkeley, CA: The University of California Press.
- Chen, Charles and Jaggi (1998). "The Association Between Independent Non Executive Directors, Family Control and Financial Disclosures". *Working Paper*. Department of Accountancy, City University of Hong Kong.
- Choi, Frederick D. S. and Gerhard G. Mueller. (1992). "International Accounting. Second Edition". London: Prentice-Hall, Inc.
- Denis, Diane K. and John J. McConnell (2003). "International Corporate Governance". *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 38, 1-36.
- Fama, E. and M. Jensen (1983). "Separation of Ownership and Control". *Journal of Law and Economics* Vol. 26, pp. 301-326.
- Fitriany (2001). "Signifikansi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib dan Sukarela Pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta". *Symposium Nasional Akuntansi IV*.
- Forker, John J. (1992). "Corporate Governance and Disclosure Quality". *Accounting and Business Research*, pp. 111-124.
- Gujarati, Damodar N. (2003). "Basic Econometrics". Fourth Edition. New York, NY: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Gunawan, Inge (2002). "Pengaruh Kelompok Industri, Basis Perusahaan, dan Tingkat Return Terhadap Kualitas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan. Tesis UGM.
- Ho, Simon S. M. and K. S. Wong (2000). "A Study of the Relationship Between Corporate Governance Structures and the Extent of Voluntary Disclosure". *Working Paper*.
- Jensen, M. C. and W. H. Meckling (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.
- Jensen, M. C. (1983). "The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control

- Systems". *Journal of Finance*, 48, 3, pp. 831-880.
- Keasy, Kevin and Mike Wright (1997). "Corporate Governance: Responsibilities, Risks and Remuneration". New York, NY: John Wiley & Sons.
- Khomsiyah (2005). "Analisis Hubungan Indeks dan Struktur *Corporate Governance* Dengan Kualitas Pengungkapan". Disertasi Doktor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Lins, Karl V. and Francis E. Warnock (2004). "Corporate Governance and the Shareholder Base".
- Malone, D., C. Fries, and T. Jones (1993). "An Empirical Investigation of the Extent of Corporate Financial Disclosure in the Oil and Gas Industry". *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, pp. 249-273.
- Marwata (2001). "Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia". Makalah, SNA IV Bandung.
- McNally, Graeme M, Lee Hock Eng, and C. Roy Hasseldine (1982). "Corporate Financial Reporting in New Zealand: An Analysis of User Preferences, Corporate Characteristics and Disclosure Practices for Discretionary Information". *Accounting and Business Research*, Winter, pp. 11-20.
- Mckinnon, J. L. and L. Dalimunthe (1993). "Voluntary Disclosure of Segment Information by Australian Diversified Companies". *Accounting and Finance*, May, pp. 33-50.
- Meek, G. K., C. B. Robert and S. J. Gray (1995). "Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures by US, UK, and Continental Europe Multinational Corp". *Journal of International Business Studies* Vol. 26, No. 3, pp. 555-572.
- Na'im, Ainun dan Fu'ad Rakhman (2000). "Analisis Hubungan Antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 15, No. 1, hal 70-82.
- Phan, P. (2000). "Taking Back the Boardroom". Singapore: McGraw-Hill.
- Pound, J. (1995). "The Promise of the Governed Corporation". *Harvard Business Review*, 73, 2, pp. 89-98.
- Ruland, W., S. Tung and N. E. George (1990). "Factors Associated with the Disclosure of Managers' Forecasts". *The Accounting Review* 16(1): 41-55.
- Salowe, W. (2002). "Integral to Good Corporate Governance". *Internal Auditors*.
- Shinghvi, S. S. and H. B. Desai (1971). "An Empirical Analysis of the Quality of Corporate Financial Disclosure". *The Accounting Review*, January, 129-138.
- Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny (1997). "A Survey of Corporate Governance". *Journal of Finance*, 52: 737-783.
- Short, H., K. Keasey, M. Wright, and A. Hull (1999). "Corporate Governance from Accountability to Enterprise". *Accounting and Business Research*.
- Subiyantoro, Edy (1997). "Hubungan Antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Dengan Karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia". Tesis S2 UGM Yogyakarta.
- Subroto, Bambang (2003). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Kepada Ketentuan Pengungkapan Wajib oleh Perusahaan-Perusahaan Publik dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Para Investor di Pasar Modal". *Disertasi Doktor UGM Yogyakarta*.

Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 yang berisi Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

Suripto, Bambang (1998). "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela Dalam Laporan Tahunan". Tesis S2 UGM Yogyakarta.

Surat Edaran No. 02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik

Susanto, Djoko (1992). "An Empirical Investigation of the Corporate Disclosure in Annual Reports of Companies Listed on the Jakarta Stock Exchange". *Tim Koordinasi Pengembangan Akuntansi Jakarta. Disertasi S3: University of Arkansas.*

Walsh, J. P. and J. K. Seward (1990). "On the Efficiency of Internal and External Corporate Control Mechanisms". *Academy of Management Review*, 15, 3, pp. 421-458.

Wong-Boren (1987). "Voluntary Financial Disclosures by American Corporations". *The Accounting Review*, Vol. LXII, No. 3, July, pp. 533-541.